

## **LEGALISASI ABORTUS PROVOCATUS KARENA PERKOSAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ASASI PEREMPUAN**

### **(ANALISIS YURIDIS PASAL 75 UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)**

**Arrie Budhiartie**

*Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

#### **Abstrak**

Masalah abortus provocatus hingga saat ini masih merupakan issue yang krusial karena di dalamnya sarat masalah etika, hukum dan norma sosial. Tindakan abortus provocatus selalu mendapat perbedaan pandangan walau di sisi lain tindakan ini akan selalu dibutuhkan. Terlebih untuk segala bentuk kehamilan yang tidak diinginkan termasuk kehamilan akibat suatu tindak pidana perkosaan. Dan bertitik tolak dari makna dan definisi kesehatan yang tidak saja mencakup kondisi fisik, mental namun juga social, maka kehamilan akibat perkosaan menimbulkan masalah kesehatan yang juga tidak ringan. Dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah memasukkan unsur akibat perkosaan sebagai alasan pembeda sebuah abortus provocatus, yang dianggap sebagai bagian dari hak azasi perempuan terutama terkait pada hak-hak reproduksi.

*Kata kunci : abortus provocatus, perkosaan, hak azasi perempuan, hak reproduksi.*

#### **PENDAHULUAN**

Masalah kesehatan perempuan merupakan suatu masalah yang sangat pelik karena kesehatan perempuan bersifat khas dan kompleks sehingga pendekatannya pun harus dilakukan secara komprehensif. Kesehatan perempuan akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya masyarakat setempat, pendidikan, gizi, akses pada informasi kesehatan terutama kesehatan reproduksi perempuan, adanya diskriminasi gender dan sebagainya.

Perempuan secara biologis dan fisiologis mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan laki-laki. Oleh karena itu perempuan mempunyai sistem reproduksi yang juga akan berbeda dengan laki-laki. Dan akar masalah kesehatan pada perempuan adalah yang terkait pada masalah kesehatan reproduksi. Berdasarkan definisi WHO tahun 1992 yang dikutip oleh Achie Sudiartie Luhulima (2006) menyatakan bahwa “ *keadaan sehat dan*

*sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan dalam segala aspek yang berkaitan dengan fungsi, sistem dan proses-prosesnya*”. Dengan melihat kalimat “ berkaitan dengan fungsi, sistem dan proses-prosesnya” jelaslah sudah bahwa kesehatan perempuan sangat terkait erat dengan kesehatan fungsi reproduksinya. Dan salah satu yang terkait dengan kesehatan reproduksi adalah masalah kehamilan. Dalam Pasal 12 ayat (1 dan 2) UU No. 7 tahun 1984 sebagai undang-undang yang meratifikasi Konvensi Wanita /Konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All of Discrimination Against Women*) menyebutkan bahwa

“negara-negara Peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan mendapat pelayanan yang layak berkualitas dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan dengan memberikan pelayanan Cuma-Cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui”.

Dengan demikian masalah kehamilan sebagai fungsi utama reproduksi perempuan wajib mendapat prioritas dalam suatu pelayanan kesehatan. Hal ini tentu sangat erat berkaitan dengan masa depan kehamilan seorang perempuan agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan sempurna sebagai masa depan suatu bangsa. Namun tidak selamanya kehamilan tersebut merupakan suatu hal yang diinginkan. Banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dengan berbagai sebab antara lain karena kegagalan penggunaan alat kontrasepsi (KB), ketidaksiapan fisik, mental maupun finansial dari ibu hamil, dan kehamilan yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindak pidana perkosaan.

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut pada umumnya akan berakhir pada suatu tindakan pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan tindakan aborsi. Sampai sekarang wacana tentang aborsi sebagai pandangan resmi para ulama maupun hasil kajian akademik dan sosial masih menggambarkan bahwa kebutuhan perempuan akan aborsi adalah realitas personal dan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Maria Ulfah Anshor (2006) menyatakan bahwa Aborsi merupakan suatu issue emosional dan kontroversial karena mungkin saja bahwa tidak ada perempuan yang ingin melakukan aborsi, tetapi mereka perlu melakukannya. Dengan atau tanpa indikasi medis apapun. Bahkan tidak jarang tekanan mental dari masyarakat pun sering menjadi penyebab dilakukannya tindakan aborsi tersebut walau sebenarnya perempuan yang bersangkutan tidak menginginkannya.

Bila dilihat dari Pasal 345 dan 346 KUHP tindakan pengguguran kandungan merupakan suatu tindak pidana, dengan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Bahkan bagi orang lain yang menganjurkan tindakan ini saja sudah diancam sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan tindakan aborsi adalah sebuah tindak pidana. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi tersebut yakni meniadakan unsure kesalahan dalam perbuatan tersebut dengan alasan adanya indikasi medis. Keberlakuan undang-undang ini yang berlandaskan pada adagium “*lex specialis derogat lex generalis*” telah menyempitkan objek pada ketentuan Pasal 345 dan 346.

Dalam Pasal 15 UU NO No. 23 Tahun 1992 ditekankan bahwa penghentian kehamilan dapat dilakukan apabila berdasarkan indikasi medis dimana kehamilan itu akan membahayakan nyawa ibu dan/atau janin. Namun permasalahan tidak berhenti sampai disitu. Terlebih sejak peristiwa perkosaan massal di Jakarta tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan pada korban perkosaan tersebut. Apakah indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu hamil termasuk juga dalam pengertian membahayakan secara psikologis? Tentunya telah diketahui bahwa perkosaan yang mengakibatkan kehamilan pada korbannya akan berdampak negatif tidak saja secara fisik namun juga mental/psikologis dan sosial.

Kasus abortus provocatus massal yang terjadi sebagai akibat kehamilan pada korban perkosaan pada periode reformasi di Jakarta (April-Mei 1998), pada awalnya dilakukan sebagai upaya menolong para korban perkosaan tersebut untuk kembali pada kehidupan sosialnya sebelum peristiwa itu terjadi (Suryono Ekota, 2001). Namun usulan dan tindakan yang dilakukan para relawan untuk kemanusiaan tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan di tanah air. Hingga pada Diskusi Panel “Aborsi Dalam Kasus Perkosaan” yang dilakukan oleh Forum Kesehatan Perempuan di Jakarta 13 Agustus 1998 mengeluarkan

pernyataan terbuka agar pemerintah melegalkan abortus provocatus bagi korban perkosaan. Pada saat itu usulan tersebut terdengar sangat radikal dan mustahil untuk diwujudkan mengingat negara Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Perdebatan terjadi dan kajian dari berbagai ilmu pun bermunculan. Barulah pada tahun 2009 tepatnya melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1992, usulan tentang legalisasi terhadap abortus provocatus karena perkosaan tersebut berhasil diwujudkan.

Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dapat dikecualikan berdasarkan.... b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Dengan demikian pada saat ini tindakan abortus provocatus karena perkosaan telah mendapat payung hukum yang cukup kuat dalam masyarakat. Namun legalisasi tersebut nampaknya akan mendapat cukup banyak pertentangan pendapat dari berbagai kalangan. Salah satu pembelaan terhadap legalisasi tersebut tentunya akan bersumber pada eksistensi hak asasi perempuan itu sendiri. Dimanakah sebenarnya status dan kedudukan diijinkannya abortus provocatus karena perkosaan tersebut dalam kajian hak asasi manusia.

Hal-hal tersebutlah di ataslah yang menarik minat penulis untuk mengangkatnya dalam wacana ilmiah yang berjudul “Legalisasi Tindakan Abortus Provocatus Karena Perkosaan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Indonesia”

## MATERI DAN METODE

### Bentuk dan Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksplanatoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji aspek hukum abortus provocatus

korban perkosaan dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara *statuta approach*, *historical approach* dan *case approach*.

### Jenis dan Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian yuridis normatif maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari (1) bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, KUHP, UU HAM No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konvensi-Konvensi Internasional tentang hak asasi manusia; (2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur maupun jurnal yang terkait objek penelitian dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus-kamus yang akan memberikan penjelasan tentang berbagai konsep dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi/perjanjian internasional seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Kedokteran.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dipergunakan beberapa metode alat pengumpul bahan hukum, yaitu :

1. *Documentary research* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer
2. *Library research* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan hukum sekunder dan tertier.

### Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan dianalisis untuk kemudian dilakukan suatu evaluasi dan penafsiran terhadap perundang-undangan yang ada agar nantinya dapat diambil suatu kesimpulan terhadap fakta hukum terkait objek penelitian yakni adanya legalisasi terhadap tindakan abortus provocatus karena perkosaan sebagai suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi perempuan.

### Konsep Operasional

Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena

kesengajaan. Sementara Black's Law Dictionary menyebutkan "abortion is the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion". Dengan demikian keguguran yang berupa keluarnya embryo atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Suryono Ekotomo, *et al.*, (2001) mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi/pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi/abortion, diantaranya *abortion criminalis*, *abortion eugenic*, *abortion induced/abortion provoked/abortus provocatus*, *abortion natural*, *abortion spontaneous*, *abortion therapeuti*,

Sementara Musa Perdanakusumah membagi pengguguran kandungan menjadi dua jenis yakni abortus spontaneous dan abortus provocatus (abortus provocatus therapeuticus dan abortus provocatus criminalis)

Perkosaan kepada suatu perbuatan seorang/beberapa orang laki-laki kepada seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan cara kekerasan dan ancaman, baik fisik dan/atau psikologis yang menimbulkan kehamilan pada perempuan yang dipaksa tersebut.

Hak asasi yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup wajar sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya (*human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*) (Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Masalah Abortus Provocatus Dalam Hukum Positif

Tindakan perkosaan biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun disertai ancaman. Perkosaan

bukan hanya menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa bagi korban, namun seringkali juga menimbulkan trauma dan kepedihan yang sangat mendalam. Pada sebagian korban, mungkin kengerian itu akan terus membayang-bayangi. Perkosaan itu sendiri diartikan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh (seorang) lelaki terhadap (seorang) perempuan dengan cara-cara yang secara hukum dan moral yang berlaku dikategorikan sebagai melanggar ketentuan tersebut. Pendapat lain mendefinisikan perkosaan sebagai sebuah perbuatan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. (Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001).

Sementara Surjono Ekotomo (2006) memberikan pengertian terhadap abortus provocatus sebagai sebuah tindakan yang menghentikan kehamilan dengan cara disengaja sebelum usia kehamilan 20 minggu. Konsep ini mengacu pada istilah dari segi medis yang memberikan batasan usia 20 minggu untuk suatu keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram yang dapat disebut sebagai aborsi. Karena apabila sesudah usia 20 minggu disebut dengan istilah partum (persalinan) dengan peluang hidup janin lebih besar dibanding usia sebelum 20 minggu. Dengan demikian dalam tulisan ini, yang merupakan hasil penelitian penulis, membatasi kajian objek sebagai sebuah tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sebuah kehamilan yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan kepada korban yang berdampak secara fisik, psikis maupun sosial.

Teori feminis yang dikutip oleh Maria Ulfah Anshor (2006) mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan dan institusi sosial yang melanggar dominasi patriarkhis yang didasarkan kekerasan dan bukan sekedar kejahatan kekerasan. Berarti perkosaan bukan hanya sekedar bentuk pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi berbentuk kekerasan sekaligus menjadi bagian dari budaya patriarkhi yang karena berulang kali terjadi dan masyarakat "membiarkan". Ini dibuktikan bahwa setiap

terjadi perkosaan, korbannya (objek) adalah perempuan dan pelakunya (subjek) nyaris selalu laki-laki.

Ketika masyarakat membiarkan terjadinya perkosaan maka komunitas tersebut dianggap mempunyai “budaya memperkosa”. Budaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosiologis, biologis maupun psikologis yang membiarkan laki-laki menumpahkan hasrat seksualnya tanpa peduli pada objek yang menjadi korbannya. Dan ketika korban mengadukan pelaku, respon yang terjadi justru kebalikannya. Masyarakat maupun sebagian besar kalangan kepolisian justru mempersalahkan korban yang dianggap sebagai orang yang memang mengkondisikan terjadinya aksi sesksual lawan jenisnya.

Dampak traumatis yang dialami dan dirasakan perempuan korban perkosaan biasanya akan semakin parah apabila dari tindakan tersebut mengakibatkan kehamilan. Kehamilan tersebut akan menjadi bukti nyata yang selalu mengingatkan korban akan peristiwa yang menakutkan tersebut. Tidak jarang kondisi ini kemudian semakin menyeras korban dalam keputus asaan yang akan berujung pada tindakan bunuh diri. Dilihat dari aspek kesehatan secara menyeluruh, kehamilan yang terjadi di saat perempuan yang hamil tersebut berada dalam kondisi traumatis dan beban psikologis yang berat, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim perempuan yang bersangkutan.

Apabila kita membaca definisi sehat dalam UU Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sehat tersebut adalah sehat secara fisik, mental dan sosial maka seorang perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dialaminya, nyaris tidak memenuhi kriteria kesehatan seperti yang dinyatakan dalam UU Kesehatan tersebut. Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang mengizinkan dilakukannya tindakan abortus provocatus karena perkosaan.

Bila dilihat secara normatif, secara umum masalah abortus provocatus sebenarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif, baik secara tersurat maupun secara

tersirat. Ketentuan-ketentuan tersebut secara umum menyangkut perlindungan hak azasi yang menjadi landasan diizinkan suatu tindakan aborsi dilakukan. Ketentuan normatif tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Secara prinsip UUD tidak mengatur masalah kebolehan atau larangan terhadap abortus provocatus terutama yang terjadi karena suatu tindak perkosaan. Namun UUD 1945 yang diamandemen memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan sebagai kelompok yang rentan. Beberapa pasal yang terkait permasalahan terhadap perlindungan hak reproduksi perempuan dapatlah dianalisis dari pasal-pasal yang tertuang dalam BAB XA Pasal 28 terutama Pasal 28 A, Pasal 28 D dan Pasal 28 H

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak reproduksi perempuan pada prinsipnya merupakan pengakuan terhadap hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Adalah hak setiap perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat secara lahir batin dan sosial dalam lingkup perlindungan hukum. Dalam hal ini artinya apabila ada hal-hal yang mengancam hidup dan kehidupan perempuan yang menyebabkan dirinya berada dalam keadaan tidak sehat dan sejahtera maka ia berhak diberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum sesuai kebutuhan dirinya.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa kondisi seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama perkosaan, akan berada dalam kegoyahan dan ketidakseimbangan mental terlebih apabila perkosaan itu mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi demikian, sebagian besar perempuan akan mengalami dilema apakah meneruskan kehamilan dengan resiko dikucilkan masyarakat karena hamil di luar nikah dan kehadiran anak tersebut hanya akan mengingatkannya pada peristiwa perkosaan yang menyimpannya; atau menggugurkan kandungannya dengan resiko menghadapi tentangan agama.

Bila dilihat dari ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 terlihat bahwa perempuan

yang mengalami kehamilan akibat perkosaan nyaris tidak mampu untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Dan secara mental akan mengalami tekanan dan perlakuan diskriminatif karena keadaan yang seringkali bukan karena kesalahannya.

Menurut penulis ketentuan Pasal 28 H ayat (3) jo Pasal 28 I ayat (4) bahwa negara dan pemerintah wajib memberikan implementasi jaminan sosial ke dalam perundang-undangan yang memberikan perlindungan pemenuhan hak reproduksi perempuan terutama dalam memberikan ketentuan terhadap dekriminalisasi tindak pidana aborsi provocatus, seperti yang telah dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak reproduksi perempuan yang berarti hak perempuan untuk memilih kapan ia ingin hamil dan kapan ia siap untuk mempunyai anak lagi yang mendukung kesiapan fisik dan mental perempuan untuk menjadi ibu. Terlebih pada perempuan yang mengalami kehamilan akibat tindak perkosaan yang dialaminya. Secara mental jelas perempuan dalam kondisi ini tidak akan siap untuk menanggung beban kehamilannya. Di sinilah pentingnya peran negara memberikan perlindungan hukum dan pengakuan hak yang utuh terhadap perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya melalui legalisasi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak tersebut.

#### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Masalah aborsi provocatus diatur dalam beberapa pasal antara lain:

a. Pasal 299 (1)

Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun...

b. Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

d. Pasal 348

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

Ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut di atas memberikan ancaman sanksi pidana tidak saja bagi pelaku aborsi provocatus tetapi juga bagi wanita hamil yang menyetujui dilakukannya penghentian kehamilan tersebut. Ancaman pidana di dalam KUHP ini tidak memberikan pengecualian terhadap alasan dilakukannya suatu tindakan aborsi provocatus.

Dalam hukum kesehatan, ketentuan KUHP ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex generalis*, dalam arti merupakan ketentuan/norma yang pengaturannya bersifat umum tanpa memberikan pengecualian apapun. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa pada dasarnya perbuatan aborsi provocatus merupakan suatu tindak pidana yang berbentuk kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh ketentuan di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan.

#### Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pada dasarnya keberlakuan Undang-Undang Kesehatan merupakan *lex specialis* dalam penegakan hukum di bidang hukum kesehatan terutama hukum pidana. Seperti yang dinyatakan dalam Aturan Penutup Buku I KUHP bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Makna ketentuan tersebut telah menyatakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP merupakan suatu ketentuan yang bersifat *lex generalis* atau hukum yang umum kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang, yang berarti menunjuk pada ketentuan *lex spesialis* atau hukum yang khusus. Dan khusus mengenai masalah abortus provocatus maka ketentuan dalam UU Kesehatan merupakan pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang telah diuraikan di atas. Pengaturan tentang penghentian kehamilan atau aborsi termasuk dalam bab tentang Kesehatan Reproduksi dan masalah aborsi diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 79.

Kutipan terhadap Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 (bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi) dapat dikecualikan berdasarkan.... b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Legalisasi abortus provocatus tersebut tidak terlepas dari ketentuan pasal-pasal terdahulu tentang makna kesehatan yakni “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” (Pasal 1 angka 1) dan hak atas kesehatan itu sendiri.

Korban perkosaan terlebih yang menimbulkan kehamilan pada umumnya akan merasa shock, terguncang, malu dan dikucilkan dari masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia yang masih mentabukan kehamilan di luar pernikahan akan semakin memperburuk kondisi mental dan sosial korban, dan lebih jauh korban akan sangat sulit untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Selanjutnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 menyebutkan hak-hak yang terkait pada pelayanan kesehatan. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” yang dalam Penjelasan disebutkan bahwa hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dikaitkan dengan Pasal 14 dimana Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan

upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dan Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau maka adalah tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan aborsi yang aman bagi para korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan tersebut dan menginginkan penghentian kehamilan.

Negara mempunyai kewajiban untuk membentuk peraturan pemerintah tentang mekanisme dan persyaratan terhadap suatu tindakan abortus provocatus akibat perkosaan tersebut agar tujuan utama dari legalisasi dan dekriminialisasi tersebut dapat terwujud dan tidak memungkinkan untuk dijadikan peluang lahirnya tindak pidana baru. Melalui Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU Kesehatan sebagai sebuah aturan pelaksana, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada perempuan yang menginginkan tindakan abortus provocatus serta tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan aborsi.

Namun penulis juga menyoroti perlunya kajian ilmiah medis yang lebih mendalam terhadap ketentuan batas usia kehamilan yang diizinkan untuk diaborsi yakni 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 76 UU Kesehatan). Persyaratan ini akan sulit untuk diterapkan terutama yang terkait pada korban perkosaan, karena akan sangat sulit mengetahui kehamilan sejak usia dini. Pada umumnya kehamilan baru diketahui setelah berusia di atas 10 minggu (kurang lebih 3 bulan). Hal ini perlu dicermati untuk mencegah ancaman sanksi pidana bagi pelaku aborsi maupun korban perkosaan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan Pasal 76 tersebut. Terlebih bagi kalangan praktisi medis (dokter) bahwa aborsi sebelum usia 20 minggu masih diperbolehkan. Oleh karena itu tak pelak lagi Pemerintah harus lebih arif dalam menuangkan berbagai aturan pelaksana terkait penyelenggaraan aborsi ini agar para pihak yang memang membutuhkan tindakan tersebut tetap mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Masalah perizinan terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi hendaknya diperketat dari aspek persyaratan kompetensi/profesionalisme maupun persyaratan administrasi.

#### Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan payung hukum terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Secara historis undang-undang ini lahir sebagai dampak pelecehan dan pelanggaran HAM secara radikal dalam era reformasi. Tingginya pelanggaran HAM yang terjadi, salah satunya adalah tingkat perkosaan massal yang sangat tinggi, telah menggugat pihak legislatif untuk menyusun suatu payung hukum terhadap perlindungan HAM tersebut. Hal ini pun didorong oleh tekanan dunia internasional agar Indonesia – yang saat itu dianggap sebagai salah satu negara pelanggar HAM terbesar di dunia- untuk membentuk suatu perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai HAM yang telah diakui secara internasional.

Hak wanita diatur dalam Bag IX Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Meski secara implisit tidak disebutkan tentang hak menentukan dirinya sendiri di bidang reproduksi, namun dapatlah dianalisis melalui berbagai pasal terkait. Pasal 45 menyebutkan bahwa “hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”. Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa seorang wanita/perempuan pun mempunyai hak yang sama dalam pemenuhan hak asasi nya sebagai seorang manusia. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat. Sementara dalam ayat (2) disebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan pengakuan yang sama di depan hukum*”.(cetak miring oleh penulis) Menurut penulis pasal ini memberikan hak yang sama pada perempuan untuk mendapatkan

pengakuan penuh terhadap hak-hak asasi terkait dengan fungsi dan sistem reproduksinya termasuk menentukan nasib dirinya sendiri (*the right of self determination*).

#### UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang ini merupakan ratifikasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sebagai suatu undang-undang ratifikasi maka ketentuan dalam undang-undang ini disesuaikan dengan isi Konvensi dengan beberapa ketentuan pengecualian seperti ketentuan Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi. Untuk isi konvensi itu sendiri akan dibahas di sub bab di bawah ini.

#### **Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tindakan Abortus Provocatus Karena Perkosaan**

##### Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia /DUHAM) 1949

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional. (*International Bil of Rights*). Dalam Mukadimahnya antara lain dikatakan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Dengan demikian Deklarasi ini merupakan fondasi utama dan pertama dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi termasuk hak asasi perempuan. Meskipun secara eksplisit tidak diketemukan pasal yang berbicara tentang hak reproduksi perempuan namun dapatlah dikaji dari beberapa pasal terkait tentang kebebasan perempuan dalam pemenuhan hak asasinya.

Bila dikaitkan dengan pokok permasalahan tentang legalisasi abortus provocatus karena



perkosaan maka ketiga pasal di atas telah memberikan suatu pernyataan akan hak asasi seorang perempuan untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan mencapai taraf kehidupan serta kesehatan yang memadai untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karena itu apabila kehamilan yang diakibatkan oleh tindak perkosaan dan menimbulkan trauma mental/psikis yang akan mengganggu derajat kesehatan dan kesejahteraan maka seorang perempuan mempunyai hak untuk memutuskan apakah akan menghentikan atau meneruskan kehamilannya.

Hak untuk menentukan kehamilannya itu jelas harus didukung oleh kebijakan negara melalui hukum positif yang secara tegas melindungi pelaksanaan hak asasi tersebut tanpa adanya ancaman pidana dan sebagainya. Itu berarti secara mendasar tindakan abortus provocatus karena perkosaan dianggap telah mendapat instrumen perlindungan dan pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

#### Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sipil dan Budaya

Kovenan ini merupakan kunci dari instrument perlindungan HAM terhadap upaya pemenuhan hak-hak asasi terutama di bidang sosial, ekonomi dan budaya, karena ketiganya merupakan bagian terpenting harkat dan martabat kemanusiaan dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu Kovenan ini pun diratifikasi menjadi oleh Pemerintah Indonesia dalam UU No. 11 Tahun 2005.

Masalah hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 12 Kovenan yang menyatakan bahwa adalah hak setiap orang untuk untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hak kesehatan fisik dan mental dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa adalah kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan ini.

Hal ini berarti seorang perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan dan

berdampak pada kesehatan mentalnya wajib mendapat layanan kesehatan yang mendukung rehabilitasi mental tersebut, antara lain pelayanan aborsi yang aman bila kondisi perempuan tersebut memang tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilan.

#### Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1982

Dari pernyataan-pernyataan tentatif dalam Piagam PBB hingga pengulangan selama enam dasawarsa, jelas bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjadi batu landasan tatanan dunia baru. Preambul Piagam PBB 1945 menyatakan bahwa rakyat PBB berketetapan hati untuk menegaskan keyakinan akan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi yang menjadi bagian dari Lampiran UU No. 7 Tahun 1984 menyebutkan bahwa negara wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan, dan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 huruf (b) ditentukan bahwa perlu dijaminnya pemeliharaan kesehatan kepada wanita pedesaan hak untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai termasuk penerangan, penyuluhan dan layanan keluarga berencana.

Ketentuan pasal-pasal di atas meski tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap dekriminalisasi abortus provocatus ataupun kita hanya melihat perlindungan yang diberikan terbatas pada perempuan yang menjalankan fungsi reproduksinya sebagai seorang ibu, namun secara umum Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW ini telah memberikan landasan yang kuat pengakuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

#### Deklarasi International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994

Pada tahun 1994 di Kairo Mesir diadakan Konferensi tentang Kependudukan dan

Pembangunan. Indonesia ikut menyetujui hasil-hasil Konferensi pada tahun yang sama. Keputusan ICPD terdiri atas 10 program kesehatan reproduksi (perempuan) yang merupakan kesehatan primer yang harus dikembangkan oleh semua negara termasuk Indonesia. Keputusan tersebut adalah:

- a. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan
- b. Pelayanan Kemandulan
- c. Pelayanan KB yang optimal
- d. Pelayanan dan Penyuluhan HIV/AIDS
- e. Pelayanan Aborsi
- f. Pelayanan dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
- g. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja; serta
- h. Tanggung jawab keluarga
- i. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan
- j. Pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia)

Di samping adanya program kesehatan reproduksi tersebut dalam Deklarasi ICPD, juga diakui adanya Hak Reproduksi Perempuan yaitu:

- a. Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan berapa lama penjarakan tiap-tiap kelahiran anak.
- b. Hak untuk mendapat pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya
- c. Hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan edukasi yang berkaitan dengan hak tersebut
- d. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Keempat hak ini dikukuhkan lagi dalam Deklarasi Beijing 1995 pada Konferensi Dunia Ke IV tentang Perempuan di Beijing yang dikenal dengan (Beijing Platform of Action)

#### Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi Dunia tentang Wanita, Beijing 1995 (BPFA/Beijing Platform of Action)

Konferensi Perempuan di Beijing merupakan suatu langkah maju terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Indonesia pun ikut mengirim

wakilnya pada konferensi ini dan telah meratifikasi hasil-hasilnya.

Dari sepuluh program kesehatan reproduksi perempuan dan dikaitkan pula dengan hak reproduksi perempuan ada satu program yang berkaitan dengan hukum dan masih diperdebatkan, yaitu tentang pelayanan aborsi. Dalam himbauan WHO disebutkan bahwa walaupun negara belum memberikan izin pelayanan aborsi, jika ada permintaan aborsi maka tindakan aborsi harus dilakukan dengan aman (*safe abortion*). Dengan diberlakukannya ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan khususnya Pasal 75 tentang legalisasi aborsi maka sudah sewajarnya Pemerintah melakukan tindak lanjut sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan tersebut dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan aborsi yang aman, terutama yang dikaitkan dengan abortus provocatus karena perkosaan.

#### **Pandangan Islam Terhadap Tindakan Abortus Provocatus Karena Perkosaan** Pengertian Aborsi dalam Fiqh

Pengertian aborsi dalam fiqh berasal dari bahasa Arab *Al-ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. (Maria Ulfah Anshor, 2006). Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fiqh tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*.)

Pada umumnya suatu perkosaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban. Hal ini tentunya akan berdampak psikologis yang berat pada korban dan tidak jarang menimbulkan trauma psikis yang luar biasa sepanjang hidupnya. Beban psikologis itu akan bertambah berat apabila perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan, yang mana kehamilan ini akan mengingatkan korban pada peristiwa perkosaan tersebut

terus menerus. Dan alasan psikologis seperti ini lah yang hingga saat ini belum dibicarakan dalam ilmu fiqh.

#### Pandangan Islam terhadap abortus provocatus

Pandangan agama Islam yang dianut masyarakat di Indonesia mayoritas melarang aborsi. Pandangan agama tersebut dipastikan bersumber dari fiqh. Dan di dalam fiqh ada 4 (empat) imam madzhab yang sangat terkenal yaitu Hanafi, Safi'i, Hambali dan Maliki. Berkaitan dengan fiqh aborsi, pendapat para ulama sangat beragam, meskipun dengan argumentasi yang sama-sama bersumber pada teks.

Ulama dari **Madzhab Hanafi** membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki masa mudghah atau janin memasuki usia 40 hari kedua.

Sementara mayoritas ulama **Hanabilah** membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah ('alaqah) karena belum berbentuk manusia.

**Syafi'iyah** melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi sebagaimana dikemukakan oleh **Al-Ghazali** dalam **Ihya Ulunuddin**, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu **Abi Sad** dan **Al-Qurthubi** membolehkan. Namun Al-Ghazali dalam Al-Wajiz pendapatnya berbeda dengan Al-Ihya, dimana beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan. Kecuali mayoritas ulama Makiyah melarang aborsi.

#### **Legalisasi Abortus Provocatus karena Perkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Kesehatan Perempuan**

Pandangan dan pendapat dari kalangan ulama tersebut tidak menyinggung persoalan psikis maupun sosial perempuan yang hamil. Kebolehan dan larangan akan aborsi hanya terbatas pada pandangan tentang kapan

kehidupan janin itu dimulai yang berarti membicarakan hak seorang janin dan menurut pendapat penulis mengabaikan hak-hak perempuan yang hamil itu sendiri. Perempuan sebagai individu yang mengalami kehamilan, termasuk kehamilan yang tidak dikehendaki, sudah seharusnya memiliki otonomi terhadap tubuhnya. Hal ini pun akan sangat relevan bila dikaitkan dengan kesiapan fisik, mental dan sosial perempuan tersebut dalam menanggung beban kehamilannya. Namun masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, masih memiliki kecenderungan melarang aborsi tersebut.

Munas Ulama Nahdatul Ulama (NU) tahun 2002 telah memberikan wacana fiqh aborsi bahwa aborsi dilarang karena merupakan pembunuhan terhadap calon manusia, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Begitu pula keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar Tarjih ke XXII di Malang menyebutkan aborsi dilarang karena merupakan perbuatan yang menentang harkat dan martabat manusia. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang selama ini menjadi "kiblat" pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait masalah-masalah keIslaman, pada tahun 2000 telah mengeluarkan fatwa senada yang substansinya sama persis dengan fatwa sebelumnya yang dikeluarkan tahun 1993 bahwa aborsi dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam aqidah kecuali apabila bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu (*abortus provocatus medicinalis*)

Namun tahun 2005 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa berbeda yang menyangkut masalah aborsi. Disebutkan bahwa aborsi bisa dilakukan bila kehamilan disebabkan oleh kasus pemerkosaan dan inses (hubungan sedarah). Dan, syaratnya, aborsi hanya diizinkan bila usia janin dalam kandungan belum mencapai 40 hari. Selain itu, dikeluarkan fatwa boleh menggugurkan janin, bila secara genetis janin yang dikandung kelak akan menjadi masalah di kemudian hari, dengan usia janin tak lebih dari 40 hari.

Ini terbilang mengejutkan, mengingat selama ini MUI menutup pintu rapat-rapat

pada berbagai kemungkinan aborsi. Menurut Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI, keputusan aborsi karena pemerkosaan dikeluarkan dengan dilandasi pemikiran munculnya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil pemerkosaan. Kiranya perlu dicermati oleh para aparat penegak hukum tentang pendapat Ketua Fatwa MUI di atas bahwa untuk mencegah penyalahgunaan keputusan yang dituangkan dalam fatwa ini, Ma'ruf menegaskan, pelaksanaan aborsi terhadap janin hasil pemerkosaan tidak sembarangan bisa dilakukan. Aborsi baru bisa dilaksanakan bila telah ada keputusan dari sebuah tim yang melibatkan keluarga, dokter, dan ulama setempat. Hanya rumah sakit atau klinik yang ditentukan Departemen Kesehatan yang dapat melakukan aborsi. Ini berarti Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pelaksana dan pendukung tentang upaya pelayanan dan tindakan hukum yang dapat mendukung aborsi aman bagi korban-korban perkosaan yang mengalami kehamilan. Antara lain tentang penunjukan rumah sakit atau sarana kesehatan yang boleh melakukannya, hukum beracara terhadap penentuan terjadinya tindak pidana perkosaan atau tidak tanpa menimbulkan tindak pidana baru seperti pelecehan, lembaga-lembaga yang menangani konseling dan rehabilitasi mental korban dan sebagainya.

Pemerintah harus sangat menekankan bahwa upaya perlindungan tersebut benar-benar diperlukan untuk memberikan hak perempuan yang lebih hakiki yakni hak untuk hidup dan hak terhadap peningkatan dan perkembangan hidupnya. Karena perkosaan merupakan suatu tindak pidana kekerasan fisik namun berdampak tidak saja fisik melainkan juga mental korban, oleh karena itu dibutuhkan instrument hukum yang sangat kuat dalam memberikan perlindungan kepada para korban tersebut agar tetap bisa mencapai standar kesehatan fisik dan mental tertinggi seperti yang telah diatur dalam berbagai instrument hukum internasional maupun nasional.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan masalah abortus provocatus diatur dalam berbagai hukum positif dan

hasil ratifikasi berbagai konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan terutama yang terkait pada masalah hak-hak kesehatan.

2. Pandangan hak asasi manusia (HAM) terhadap tindakan abortus provocatus karena perkosaan diatur dalam berbagai Konvensi dan Kovenan Internasional tentang HAM. Yakni:
  - a. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia
  - b. Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - c. Konvensi CEDAW 1984
  - d. Deklarasi International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994
  - e. Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi Dunia tentang Wanita, Beijing 1995 (BPFA/Beijing Platform of Action)
3. Pandangan Islam terhadap tindakan abortus provocatus karena perkosaan dapat dilihat berdasarkan pandangan dan pendapat para ulama ke empat madzhab yakni Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i yang secara umum menyetujui tindakan abortus sebelum usia janin 40 hari. Sementara fatwa MUI tahun 2005 menyetujui secara tegas tindakan aborsi karena perkosaan dengan persyaratan usia janin tidak lebih dari 40 hari, kondisi ibu hamil terganggu secara mental, dilakukan di sarana kesehatan/rumah sakit tertentu dan diputuskan oleh sebuah tim yang terdiri dari ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan ulama begitu juga.
4. Legalisasi abortus provocatus karena perkosaan merupakan salah satu implementasi pemenuhan hak asasi perempuan terutama di bidang kesehatan reproduksi. Meski sebagian besar instrument HAM dan peraturan perundang-undangan tentang HAM tidak memberikan pernyataan eksplisit namun hak menentukan diri sendiri untuk mendapatkan hak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya termasuk di dalamnya menentukan kapan seorang

perempuan akan hamil dan melahirkan. Dan dalam kasus-kasus kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, adalah hak asasi korban untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan kehamilannya. Tindakan tersebut harus didukung penuh oleh hukum positif negara agar tidak terjadi celah hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa legalisasi tindakan abortus provocatus karena perkosaan seperti yang diatur dalam Pasal 75 UU Kesehatan secara prinsip merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan terutama hak reproduksi dan hak hidup serta mempertahankan kehidupan.

#### **Saran**

Agar legalisasi tindakan abortus provocatus tersebut tidak disalahgunakan dan diartikan sebagai legalisasi tindakan hubungan sex bebas, maka pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana tentang hal-hal terkait pelaksanaan tindakan tersebut, yakni:

- a. Peraturan Pelaksana tentang ijin dan Penunjukan Rumah sakit penyelenggara tindakan
- b. Peraturan Pelaksana tentang kewenangan pihak-pihak tertentu dalam menetapkan ada tidaknya tindak pidana perkosaan
- c. Peraturan Pelaksana tentang tim konseling dan rehabilitasi terhadap para korban perkosaan.

Di samping itu perlu dilakukan pembenahan sistem penegakan hukum melalui upaya peningkatan kesadaran aparat penegak hukum terhadap proses penyelesaian hukum suatu tindak pidana perkosaan agar tidak menimbulkan penderitaan lain bagi korban secara mental/psikologis maupun materiil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Bahan Literatur:**

Abdul Wahid & Muhammad Irfan; 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas

- Hak Asasi perempuan); Refika Aditama; Bandung
- Achie Sudiartie Luhulima, editor; 2006; Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia; 2005; Hak Asasi Perempuan, Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender; Yayasan Obor Indonesia; Jakarta
- Majda El-Muhtaj; 2005; Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Kencana; Jakarta
- Maria Ulfah Anshor; 2006; Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan; Penerbit Buku Kompas; Jakarta
- Miriam Budiarto; 2008; Dasar-Dasar Ilmu Politik; Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Muladi et al; 2005; HAM, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat; Refika Aditama; Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rhona K.M. Smith et al; 2010; Hukum Hak Asasi Manusia; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta
- Suryono Ekotomo; 2001; Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana; Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

##### **Perundang-Undangan Terkait**

- Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandement
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia
- Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Konvensi CEDAW 1984  
Deklarasi International Conference on Population  
and Development (ICPD) Kairo 1994

Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi  
Dunia tentang Wanita, Beijing 1995  
(BPFA/Beijing Platform of Action)